

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN (STUDI RETRIBUSI ANGKUTAN BATU BARA DI UPTD PERHUBUNGAN DERMAGA MENGGKATIP)

Muhammad Alfi<sup>1</sup>, Reno Affrian<sup>2</sup>, Jumaidi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [alfidusun@gmail.com](mailto:alfidusun@gmail.com)

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi angkutan batu bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, yang ditandai dengan sarana prasarana yang terbatas seperti ketiadaan listrik dan komputer dinas, serta sistem pelaporan yang masih manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data berjumlah 8 orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Namun, pada dimensi sumber daya masih terkendala pada anggaran, fasilitas kerja (komputer), armada sungai, dan akses listrik yang belum tersedia. Faktor pendorongnya adalah landasan hukum yang kuat dan kepatuhan wajib retribusi, sedangkan faktor penghambatnya adalah kendala teknis fasilitas dan kondisi alam (cuaca). Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan retribusi angkutan batu bara pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, maka disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD agar melakukan pengadaan perangkat komputer kantor, pemeliharaan armada sungai, dan penyediaan akses listrik. Disamping itu, perlu alokasi anggaran operasional yang memadai serta pengawasan berkala guna menjamin tercapainya target anggaran secara maksimal. meminimalisir fluktuasi setoran sehingga target anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Retribusi Daerah, Angkutan Batu Bara.

## ABSTRACT

*The background of this research is the sub-optimal receipt of Local Generated Revenue (PAD) from the coal transportation levy sector at the Mengkatip Pier Transportation Technical Implementation Unit (UPTD), characterized by limited infrastructure such as the absence of electricity and official computers, as well as a manual reporting system. This research aims to determine the implementation of the policy regarding Regional Taxes and Levies in Barito Selatan Regency (A Study of Coal Transportation Levies at the Mengkatip Pier Transportation UPTD) and the factors influencing it. This study employs a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, with data sources consisting of 8 informants selected through purposive sampling. Data analysis utilizes the Miles and Huberman model (data condensation, data display, and conclusion drawing). The research results indicate that policy implementation, viewed from the dimensions of communication, disposition, and bureaucratic structure, has functioned well. However, the resource dimension is still constrained by budget, work facilities*

*(computers), river fleet, and unavailable electricity access. Driving factors include a strong legal basis and levy payer compliance, while inhibiting factors include technical facility constraints and natural conditions (weather). To optimize the implementation of the coal transportation levy policy at the Mengkatip Pier Transportation UPTD, it is suggested that the Head of the Transportation Agency, through the Head of the UPTD, conduct procurement of office computer devices, maintenance of the river fleet, and provision of electricity access. Additionally, adequate operational budget allocation and periodic supervision are required to ensure the maximum achievement of budget targets, minimizing deposit fluctuations so that the predetermined budget targets can be achieved optimally.*

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Levy, Coal Transportation.

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui optimalisasi potensi daerah masing-masing. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu instrumen penting dalam meningkatkan PAD adalah melalui sektor Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di Kabupaten Barito Selatan, sektor perhubungan perairan memiliki potensi yang sangat besar mengingat letak geografisnya yang dilintasi oleh jalur transportasi sungai yang padat, terutama bagi aktivitas pengangkutan hasil tambang seperti batu bara.

UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan memungut retribusi angkutan perairan bagi kapal-kapal tongkang batu bara yang melintasi Sungai Barito. Posisi Dermaga Mengkatip sebagai pintu keluar masuk transportasi air menjadikannya tumpuan utama dalam pencapaian target PAD sektor perhubungan. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan kebijakan retribusi ini masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengakibatkan realisasi penerimaan belum mencapai titik optimal dan cenderung fluktuatif.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi yang ditetapkan dengan kondisi operasional. Secara infrastruktur, UPTD Dermaga Mengkatip masih sangat memprihatinkan karena belum tersedianya aliran listrik yang memadai dan ketiadaan perangkat komputer dinas untuk mendukung sistem administrasi. Kondisi ini memaksa petugas melakukan pelaporan secara manual atau menggunakan perangkat pribadi di luar jam kerja. Selain itu, keterbatasan armada sungai yang layak huni bagi petugas lapangan serta faktor cuaca ekstrem di Sungai Barito seringkali menjadi penghambat dalam proses pemungutan retribusi secara langsung di atas kapal.

Implementasi kebijakan pada dasarnya bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah aktivitas yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang memandang keberhasilan implementasi dari empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kejelasan informasi, kecukupan fasilitas, komitmen pelaksana, serta kejelasan standar operasional menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan retribusi ini berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip) serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah demi keberlangsungan pembangunan daerah yang lebih baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena implementasi kebijakan retribusi daerah berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian ditetapkan di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, yang dipilih karena memiliki potensi retribusi angkutan perairan yang besar namun masih menghadapi kendala sarana prasarana yang signifikan. Sumber data primer diperoleh dari 8 orang informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari Kepala UPTD, Bendahara Penerimaan, Petugas Lapangan, serta pihak agen kapal angkutan batu bara selaku wajib retribusi. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait hambatan komunikasi dan sumber daya, observasi langsung terhadap aktivitas operasional di dermaga, serta dokumentasi berupa laporan realisasi retribusi dan regulasi terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama, yakni kondensasi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan pernyataan antar informan serta triangulasi teknik dengan mengecek konsistensi data antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara Di Uptd Perhubungan Dermaga Mengkatip)

Keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen kompleks di lapangan. Berdasarkan perspektif George C. Edward III (Agustino, 2022), terdapat empat variabel utama yang menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, maka hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik membutuhkan proses transmisi informasi yang efektif agar para pelaksana memahami tujuan dan langkah yang harus diambil. Dalam konteks pemungutan retribusi di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip, dimensi komunikasi dianalisis melalui aspek kejelasan dan konsistensi.

##### a. Kejelasan

Kejelasan informasi bertujuan untuk meminimalisir ambiguitas atau salah tafsir dalam pelaksanaan tugas. Informasi yang jernih memudahkan pelaksana dalam menerjemahkan aturan ke dalam tindakan nyata.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa komunikasi mengenai tugas pemungutan retribusi telah disampaikan secara jelas oleh Kepala UPTD kepada seluruh staf. Instruksi yang diberikan mencakup tata cara pemungutan, target yang harus dicapai, hingga penggunaan seragam dinas. Kejelasan ini memastikan petugas memahami jenis-jenis retribusi yang harus dipungut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Konsistensi

Konsistensi komunikasi berarti perintah yang diberikan harus tetap ajeg dan tidak berubah-ubah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tugas pemungutan retribusi yang tetap berpedoman teguh pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tanpa adanya perubahan instruksi yang mendadak. Selain itu, bentuk konsistensi juga terlihat dari mekanisme pelaporan; meskipun petugas menghadapi tantangan geografis berupa jarak tempuh yang jauh (sekitar 3 jam perjalanan melalui jalur air) untuk mencapai kantor dinas, koordinasi dan penyetoran hasil retribusi tetap dilaksanakan secara konsisten setiap dua hingga tiga bulan sekali. Ketetapan pola pelaporan dan ketaatan terhadap aturan main ini menjamin bahwa kebijakan retribusi angkutan batu bara tetap berjalan stabil meskipun dalam keterbatasan akses transportasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah sebuah kebijakan dapat dioperasionalkan secara nyata atau hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang tersedia, baik itu berupa kapasitas personel, dukungan finansial, maupun sarana fisik pendukung guna memastikan kebijakan dapat berjalan secara efisien.

a. Staf

Personel atau staf adalah penggerak utama dalam setiap proses birokrasi. Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada kecukupan jumlah petugas serta kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas lapangan. Ketidakeimbangan antara beban kerja dengan jumlah personel dapat menjadi penghambat utama dalam pencapaian target organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan staf di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip sudah tergolong baik dan memadai secara kuantitas. Untuk menjamin kelancaran pemantauan lalu lintas kapal batu bara di Sungai Barito, petugas telah dibagi ke dalam kelompok kerja yang sistematis, yaitu Regu A dan Regu B. Setiap regu menjalankan sistem piket selama 24 jam secara bergantian, sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa kekosongan petugas.

b. Anggaran

Anggaran merupakan modal finansial yang krusial untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional. Tanpa dukungan dana yang mencukupi, aspek-aspek penunjang kebijakan tidak akan dapat terpenuhi secara maksimal. Anggaran yang memadai

memungkinkan organisasi untuk melakukan pemeliharaan sarana dan penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran pada UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip masih tergolong kurang baik. Keterbatasan alokasi dana ini berdampak pada minimnya seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pemungutan retribusi bagi petugas yang bekerja di area perairan serta terhambatnya biaya pemeliharaan rutin untuk aset-aset dinas. Kondisi anggaran yang belum mencukupi ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi secara optimal.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Ketersediaan sarana yang modern dan memadai akan sangat mendukung kecepatan serta akurasi kerja. Sebaliknya, ketiadaan infrastruktur yang layak akan memaksa petugas bekerja dengan cara-cara konvensional yang kurang efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung masih tergolong kurang baik dan menjadi kendala paling serius. Kantor UPTD belum memiliki perangkat komputer dan printer dinas untuk menunjang administrasi, sehingga pelaporan masih dilakukan secara manual. Lebih lanjut, ketiadaan aliran listrik pada siang hari di wilayah dermaga serta kondisi armada sungai (perahu kelotok) yang sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan teknis sangat menghambat mobilitas petugas saat hendak melakukan pemungutan retribusi di atas kapal tongkang.

3. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam menjamin kebijakan berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Keberhasilan implementasi tidak hanya menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga harus memiliki kemauan, komitmen, dan pengaturan yang tepat dalam menjalankannya

a. Sikap

Sikap pelaksana mencerminkan dukungan atau penolakan terhadap sebuah kebijakan. Jika personel memiliki dedikasi yang tinggi, maka berbagai hambatan teknis di lapangan akan lebih mudah diatasi melalui profesionalisme kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan komitmen petugas yang tetap menjalankan tugas pemungutan retribusi secara konsisten meskipun bekerja di bawah tekanan keterbatasan fasilitas kerja. Para petugas menunjukkan integritas dengan selalu memberikan karcis resmi kepada setiap wajib retribusi (agen kapal) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan pendapatan daerah.

b. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi dalam dimensi disposisi merujuk pada bagaimana penempatan dan pengorganisasian pelaksana diatur sedemikian rupa untuk mendukung kelancaran tugas. Penempatan posisi yang strategis dan pembagian wewenang yang tepat akan memperkuat kecenderungan pelaksana untuk bekerja secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kerja yang terstruktur jelas bagi seluruh personel. Pimpinan telah mengatur jadwal piket harian yang terbagi ke dalam dua regu (Regu A dan Regu B) untuk memastikan pengawasan di area dermaga berlangsung selama 24 jam tanpa jeda. Selain itu, pimpinan secara konsisten mengatur mekanisme pelaporan dan penyetoran hasil retribusi agar tetap tertib administrasi. Pengaturan birokrasi yang tertata ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki kemauan yang kuat untuk tetap patuh pada prosedur kerja meskipun didukung oleh sarana prasarana yang sangat terbatas

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan kerangka kerja yang mengatur koordinasi dan prosedur antar pelaksana kebijakan. Menurut George C. Edward III dalam (Leo Agustino 2022:154), meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memiliki kemauan (disposisi), kebijakan dapat gagal jika struktur birokrasi tidak mendukung melalui kejelasan alur kerja dan sinergi antar instansi.

##### a. Standard Operating Procedures (SOP)

SOP adalah panduan tertulis yang memuat urutan langkah teknis agar pegawai dapat menjalankan tugas secara seragam, efektif, dan efisien. Keberadaan prosedur tetap sangat penting untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian jadwal piket yang sistematis bagi petugas (Regu A dan Regu B) untuk menjamin pemantauan arus kapal batu bara selama 24 jam penuh. Selain itu, petugas di lapangan telah mengikuti alur pemungutan retribusi yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024, sehingga setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum dan langkah-langkah yang pasti.

##### b. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi merupakan proses penyelarasan aktivitas antar berbagai unit organisasi guna mencapai tujuan bersama secara efektif. Sinergi yang baik antar lembaga akan memastikan hambatan di tingkat bawah dapat segera dicarikan solusi oleh otoritas yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tergolong sangat baik dan harmonis. Meskipun terdapat tantangan geografis berupa jarak tempuh perjalanan air yang mencapai 3 jam, proses koordinasi terkait pelaporan administrasi dan penyetoran hasil retribusi tetap dilakukan secara rutin setiap dua hingga tiga bulan sekali. Komunikasi yang terjalin dengan intensitas tersebut memastikan bahwa Dinas Perhubungan tetap dapat memantau perkembangan pendapatan daerah serta kendala-kendala yang dihadapi petugas di area dermaga secara berkelanjutan.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara Di Uptd Perhubungan Dermaga Mengkatip)**

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan, senantiasa terdapat elemen-elemen yang menjadi kekuatan pendukung maupun hambatan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan. Hal ini juga berlaku pada Implementasi Kebijakan Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Faktor penghambat**

#### **a. Minimnya Fasilitas Pendukung Kerja**

Sarana prasarana merupakan alat penunjang yang menentukan efisiensi dan efektivitas kinerja di lapangan. Ketersediaan fasilitas yang layak sangat membantu kelancaran tugas, sementara keterbatasan sarana akan menghambat produktivitas pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip masih tergolong kurang baik dan jauh dari standar ideal operasional. Hal ini teridentifikasi dari ketiadaan perangkat komputer dan printer dinas yang menjadi hambatan utama sehingga menyebabkan seluruh proses rekapitulasi data retribusi harus dilakukan secara manual, yang mana kondisi tersebut tidak hanya memperlambat alur kerja tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam pencatatan data keuangan daerah. Masalah ini diperparah dengan ketersediaan infrastruktur energi yang sangat terbatas, di mana aliran listrik hanya menyala pada malam hari sehingga melumpuhkan aktivitas administrasi kantor pada jam kerja operasional karena penggunaan perangkat elektronik untuk mendukung percepatan laporan menjadi mustahil dilakukan pada siang hari. Selain kendala teknis di kantor, fasilitas lapangan berupa armada sungai (perahu kelotok) ditemukan dalam kondisi yang sudah berusia tua dan sering mengalami gangguan mesin, sehingga menjadi hambatan serius dalam mobilitas petugas saat harus menjangkau kapal tongkang di tengah perairan Sungai Barito yang pada akhirnya menurunkan intensitas pengawasan serta mengancam keselamatan petugas saat menjalankan kewajiban penagihan retribusi.

#### **b. Kurangnya Ketersediaan Anggaran Operasional**

Sumber daya anggaran merupakan instrumen krusial dalam implementasi kebijakan sebagai modal utama untuk menjamin kelancaran program. Tanpa dukungan dana yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal terutama dalam pemenuhan sarana pendukung kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa minimnya anggaran menjadi kendala utama di UPTD Mengkatip. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas lapangan serta menghambat biaya perawatan rutin mesin armada sungai (perahu kelotok) yang sering mengalami gangguan teknis. Keterbatasan dana ini mengakibatkan operasional pemungutan retribusi belum didukung oleh standar keamanan dan fasilitas yang ideal.

#### **c. Kondisi Lingkungan dan Geografis**

Lingkungan tempat pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi kelancaran operasional petugas di lapangan. Kondisi alam yang tidak menentu dapat menjadi tantangan fisik dan teknis yang menghambat pencapaian target kerja secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan menjadi penghambat yang sangat signifikan dalam proses pemungutan retribusi di UPTD Mengkatip. Letak dermaga yang berada tepat di jalur perairan aktif Sungai Barito mengharuskan petugas untuk berhadapan langsung dengan fenomena alam, seperti cuaca ekstrem, angin kencang, dan arus sungai yang sangat kuat. Tantangan geografis ini sering kali melumpuhkan mobilitas petugas saat harus mendekati dan naik ke atas kapal tongkang yang sedang melintas. Selain menghambat kecepatan pelayanan, kondisi lingkungan yang tidak bersahabat ini secara otomatis meningkatkan risiko keselamatan kerja (K3) bagi petugas lapangan, mengingat minimnya fasilitas keamanan pendukung saat bertugas di tengah sungai. Oleh karena itu, faktor alam ini menjadi kendala yang tidak dapat diprediksi namun berdampak besar pada efektivitas penagihan retribusi setiap harinya.

## 2. Faktor Pendukung

### a. Konsistensi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan pedoman kerja yang sangat krusial dalam sebuah birokrasi untuk memastikan setiap tindakan pelaksana di lapangan bersifat terarah dan seragam. Keberadaan prosedur yang baku berfungsi sebagai kendali agar implementasi kebijakan tetap berada pada koridor hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan SOP menjadi pilar utama dalam mendukung kelancaran pemungutan retribusi di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pemantauan pergerakan kapal, penghitungan tarif, pemberian bukti karcis resmi, hingga proses pelaporan hasil pungutan, dilakukan secara konsisten sesuai petunjuk teknis yang ada. Kepatuhan petugas terhadap SOP ini menjamin terciptanya koordinasi yang tertib antarpersonel

### b. Adanya Kepastian Hukum dan Sikap Kooperatif Subjek Retribusi

Landasan hukum yang kuat memberikan legitimasi penuh bagi petugas dalam menjalankan kewajibannya, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat atau badan usaha mengenai legalitas sebuah pungutan daerah. Efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dari pihak-pihak yang menjadi target sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kelancaran pemungutan retribusi didukung secara signifikan oleh adanya dasar hukum yang sah berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan. Legalitas yang jelas ini memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada awak kapal, terutama saat terjadi penyesuaian tarif retribusi. Selain itu, sikap kooperatif dan kepatuhan awak kapal dalam membayar retribusi setiap kali melintasi wilayah kerja UPTD Dermaga Mengkatip menjadi faktor pendorong penting yang memastikan proses penagihan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala yang berarti dari sisi wajib retribusi.

## SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian pada Implementasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Retribusi Angkutan Batu Bara) di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip Kabupaten Barito Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek, yakni:

Pertama; Sumber Daya yaitu Anggaran tergolong kurang baik karena alokasi dana yang terbatas sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan operasional lapangan. Kedua; Sumber Daya yaitu Fasilitas tergolong kurang baik karena belum tersedianya perangkat komputer dinas dan printer untuk mendukung pekerjaan. Ketiga; Kondisi Lingkungan dan Geografis tergolong kurang mendukung akibat tantangan alam di perairan Sungai Barito dan kendala infrastruktur listrik yang hanya berfungsi pada malam hari.

Sedangkan aspek yang sudah berjalan dengan baik yaitu: Pertama; Komunikasi yaitu Kejelasan dan Konsistensi, di mana sosialisasi aturan retribusi sudah disampaikan dengan jelas kepada petugas maupun wajib retribusi. Kedua; Sumber Daya yaitu Staf sudah tergolong baik karena jumlah personel sudah memadai dan mencukupi untuk pembagian tugas regu. Ketiga; Disposisi yaitu Sikap Pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas meskipun di tengah keterbatasan sarana. Keempat; Struktur Birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Koordinasi sudah berjalan baik melalui pembagian jadwal piket 24 jam dan pelaporan rutin.

Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip terdiri dari dua faktor. Faktor Penghambat, yaitu: 1) Kurangnya ketersediaan anggaran operasional; 2) Minimnya fasilitas pendukung kerja (ketiadaan komputer dan kendala listrik); serta 3) Tantangan lingkungan dan geografis. Faktor Pendukung, yaitu: 1) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten dijalankan; dan 2) Adanya kepastian hukum (Perda) serta sikap kooperatif dari para wajib retribusi (awak kapal).

Agar Implementasi Kebijakan Retribusi Angkutan Batu Bara di UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka disarankan kepada:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan selaku pemegang kebijakan anggaran agar dapat memprioritaskan alokasi dana operasional yang lebih memadai bagi UPTD Mengkatip. Upaya ini sangat mendesak terutama untuk pengadaan fasilitas kerja pokok seperti komputer dan printer dinas agar proses rekapitulasi data tidak lagi dilakukan secara manual. Selain itu, Dinas Perhubungan perlu melakukan peremajaan atau perbaikan menyeluruh terhadap armada sungai (perahu kelotok) dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan saat menjangkau kapal tongkang di perairan Sungai Barito serta meningkatkan efisiensi mobilitas operasional pemungutan retribusi.
2. Kepala UPTD Perhubungan Dermaga Mengkatip disarankan untuk melakukan terobosan dalam mengatasi kendala infrastruktur, terutama mengenai ketersediaan listrik yang hanya menyala pada malam hari. Perlu diupayakan pengadaan sumber daya energi alternatif seperti mesin genset atau perangkat panel surya sederhana guna mendukung aktivitas administrasi kantor pada siang hari. Selain itu, pimpinan UPTD diharapkan tetap mempertahankan koordinasi intensif dan konsistensi pengawasan terhadap regu piket 24 jam yang sudah berjalan baik, guna menutup celah potensi kebocoran retribusi akibat faktor lingkungan atau cuaca yang sulit diprediksi.
3. Para Agen Pelayaran dan Wajib Retribusi (Awak Kapal) diharapkan agar senantiasa mempertahankan sikap kooperatif dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban retribusi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Komunikasi yang baik antara pihak perusahaan/agen dengan petugas lapangan perlu terus ditingkatkan agar proses penagihan tetap berjalan aman dan tertib. Kesadaran akan kontribusi retribusi bagi pembangunan daerah diharapkan menjadi dasar kerja sama yang harmonis demi kelancaran arus transportasi logistik batu bara di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2024. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2. Buntok: Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Anonim. Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Agustino Leo. 2022. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Miles Matthew B. 2014. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. Singapore: SAGE Asia- Pasifik.
- Nugroho Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR
- Pua Tingga C. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sari, Ifit Novita, et al. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan Irza. 2022. *Komunikasi & Advokasi Kebijakan*. Amuntai: CV. HEMAT Publishing.
- Subianto Agus. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang.